

Strategi Pemerintah Desa Dalam Menangani Permasalahan Sampah Di Desa Tinggede Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi

Nur Auliyah Alifyah Ali ^{1*}; Muhammad Arief ²; Rusmawaty Bte Rusdin ³

¹ Universitas Tadulak, Palu, Indonesia; nurauliya2004@gmail.com

² Universitas Tadulak, Palu, Indonesia; muhammadarief@untad.ac.id

³ Universitas Tadulak, Palu, Indonesia; rusmawatyrusdin2025@gmail.com

*Correspondence : nurauliya2004@gmail.com

ARTICLE INFO:

Kata kunci: *pengelolaan sampah, pemerintah desa, strategi pemerintah, Tinggede*

Received : Mei 2026

Revised : Mei 2026

Accepted : Juni 2026

ABSTRAK:

Permasalahan sampah merupakan isu lingkungan yang berdampak pada kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat, termasuk di Desa Tinggede, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, yang mengalami peningkatan volume sampah akibat pertumbuhan penduduk dan permukiman tanpa diimbangi sistem pengelolaan yang optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi Pemerintah Desa Tinggede dalam menangani permasalahan sampah berdasarkan kerangka teori strategi pemerintah menurut Teori Geoff Mulgan (2009) yang meliputi tujuan, lingkungan, pengarah, tindakan, dan pembelajaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, dilaksanakan di Desa Tinggede dalam kurun waktu penelitian tertentu dengan melibatkan sejumlah informan dari aparat pemerintah desa dan masyarakat, serta menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa telah menetapkan tujuan yang berorientasi pada lingkungan bersih dan sehat serta melakukan beberapa tindakan seperti kerja bakti dan koordinasi pengangkutan sampah, namun secara keseluruhan strategi belum berjalan optimal karena keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya sosialisasi berkelanjutan yang berdampak pada rendahnya kesadaran masyarakat, serta belum adanya mekanisme evaluasi yang terstruktur dan regulasi desa yang spesifik. Kesimpulannya, penelitian ini memberikan kontribusi dalam mengidentifikasi kelemahan strategi pengelolaan sampah di tingkat desa dan menegaskan pentingnya penguatan strategi melalui peningkatan koordinasi lintas pihak, penyediaan fasilitas pendukung, intensifikasi edukasi masyarakat, serta penyusunan kebijakan yang lebih tegas dan berkelanjutan sebagai implikasi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di tingkat lokal.

ABSTRACT :

The waste problem is an environmental issue that significantly affects environmental quality and public health, including in Tinggede Village, Marawola District, Sigi Regency, where increasing population and residential development have led to a rise in household waste volume without being matched by an optimal management system. This study aims to examine the strategy of

the Tinggede Village Government in addressing waste management issues using Geoff Mulgan's government strategy framework, which includes goals, environment, direction, Actions, and learning. This research employs a qualitative approach with a descriptive method, conducted in Tinggede Village over a certain research period, involving a number of informants from village government officials and the community, with data collected through in-depth interviews and documentation studies. The results show that the village government has established goals oriented toward creating a clean and healthy environment and has undertaken Actions such as community clean-up activities and coordination of waste transportation; however, overall, the strategy has not been optimally implemented due to limited facilities and infrastructure, lack of continuous socialization and environmental education resulting in low public awareness, and the absence of structured evaluation mechanisms and specific village regulations on waste management. In conclusion, this study contributes to identifying weaknesses in village-level waste management strategies and highlights the need to strengthen government strategies through enhanced cross-sector coordination, provision of supporting facilities, increased community education, and the formulation of more assertive and sustainable policies, with broader implications for improving the effectiveness of local waste management.

Pendahuluan

Kajian dalam ilmu pemerintahan pada dasarnya menitikberatkan pada bagaimana negara melalui institusi pemerintahan merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Fungsi pemerintahan tidak hanya terbatas pada regulasi, tetapi juga mencakup pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan serta tata kelola pemerintahan yang baik (Rahman *et al.*, 2023). Dalam kerangka desentralisasi, pemerintah desa memiliki peran strategis karena menjadi institusi yang paling dekat dengan masyarakat, sehingga memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam menyelesaikan berbagai persoalan lokal secara efektif (Widjaja, 2017).

Permasalahan sampah merupakan isu publik yang kompleks karena tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pengelolaan, tetapi juga menyangkut aspek sosial, budaya, dan tata kelola pemerintahan. Pengelolaan sampah termasuk dalam layanan dasar yang menjadi tanggung jawab pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah, termasuk pemerintah desa, memiliki kewajiban untuk menyediakan sistem pengelolaan sampah yang efektif, efisien, dan berkelanjutan (Presiden Republik Indonesia, 2014). Selain itu, Peran masyarakat sangat penting dalam mengatasi permasalahan sampah dan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata (Wijayanti, Dhokhikah and Rohman, 2023).

Secara lebih spesifik, Desa Tinggede yang terletak di Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, merupakan wilayah yang mengalami perkembangan sosial ekonomi yang cukup pesat. Namun, peningkatan aktivitas masyarakat tersebut belum

diimbangi dengan sistem pengelolaan sampah yang memadai. Berdasarkan hasil observasi lapangan, ditemukan bahwa volume timbunan sampah harian mencapai ± 150 ton, dengan sebaran sampah yang tidak terkelola dengan baik di berbagai titik seperti jalan utama, lingkungan permukiman, dan lokasi pembuangan ilegal. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan layanan kebersihan dengan kapasitas pemerintah desa dalam menyediakannya.

Permasalahan utama dalam pengelolaan sampah di Desa Tinggede meliputi keterbatasan sarana dan prasarana seperti kurangnya armada pengangkut sampah, kapasitas Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang tidak mencukupi, serta lokasi TPS yang kurang strategis. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempat yang telah disediakan turut memperparah kondisi lingkungan. Lemahnya penerapan sanksi terhadap pelanggaran juga menyebabkan kebijakan yang telah dibuat tidak berjalan efektif. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan tidak hanya terletak pada aspek teknis, tetapi juga pada aspek sosial dan kelembagaan.

Perspektif teori strategi pemerintahan, Teori Geoff Mulgan (2009) menekankan bahwa strategi merupakan rencana yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu, yang dalam pelaksanaannya melibatkan berbagai komponen seperti tujuan, lingkungan, proses pelaksanaan, serta evaluasi sebagai bentuk pembelajaran untuk perbaikan berkelanjutan (Mulgan, 2009). Dalam konteks Desa Tinggede, terdapat permasalahan pada indikator lingkungan berupa rendahnya kesadaran masyarakat, serta pada indikator tindakan berupa lemahnya implementasi sanksi. Hal ini mengindikasikan bahwa strategi pemerintah desa dalam pengelolaan sampah belum berjalan optimal.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah di tingkat lokal sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat dan inovasi kelembagaan. Penelitian oleh (Rosadi, 2023) menunjukkan bahwa strategi dalam pengelolaan sampah kota palu adalah mengembangkan fasilitas pengelolaan sampah terpadu melalui pemanfaatan pengelolaan sampah berteknologi tepat guna dan ramah lingkungan. Penelitian lain oleh (Silfana, 2024) menegaskan bahwa strategi pemerintah dalam mewujudkan Adipura melalui pengelolaan sampah di TPA Kawatuna Kota Palu dilakukan melalui peremajaan armada, peningkatan pelayanan, dan revitalisasi TPA agar memiliki nilai energi dan ekonomi. Selain itu, pemerintah juga meningkatkan sosialisasi dan partisipasi masyarakat, memperkuat kapasitas SDM, serta menambah sarana dan prasarana seperti TPS. Berdasarkan analisis SWOT, strategi ini didukung oleh kebijakan pemerintah dan peluang pengelolaan sampah bernilai ekonomi, namun masih menghadapi kendala pada keterbatasan fasilitas dan rendahnya kesadaran masyarakat. Selain itu, (Iswahiyudi, 2022) menyatakan bahwa upaya pelaksanaan implementasi kebijakan yang dilakukan oleh pihak pengelola pasar dapat dijelaskan bahwa implementasi yang terjadi di pasar proses manonda mengenai pengelolaan sampah belum berjalan efektif diakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat. Disebabkan tidak adanya sanksi yang tegas ketika membuang

sampah sembarangan dan kurangnya kesiapan pengelola pasar untuk memberikan solusi terbaik mengenai sampah yang terjadi di pasar inpres manonda. (Rifaldi, Mahfuzat and Rusdin, 2026) juga menekankan kolaborasi pada tingkat strategis telah berjalan efektif melalui dialog tatap muka yang inklusif, pembangunan kepercayaan berbasis transparansi, serta komitmen sumber daya dan peran aktor sesuai kapasitas masing-masing. Namun, pada tingkat operasional masih terdapat kendala, seperti lemahnya pemahaman bersama di masyarakat dan tidak berkelanjutannya hasil antara akibat belum optimalnya sistem pengangkutan sampah. (Irawati, Pageno and Sisrilnardi, 2025) menemukan bahwa pemerintah sering kali hanya bertindak saat keadaan darurat atau saat sorotan publik meningkat. Regulasi yang ada seperti Perda No. 5 Tahu 2017 belum diimplementasikan secara optimal. Kurangnya fasilitas, armada pengangkut sampah serta kesadaran masyarakat menjadi kendala utama dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Bahodopi.

Meskipun berbagai penelitian terdahulu telah membahas pengelolaan sampah, penelitian ini memiliki fokus yang berbeda karena secara khusus mengkaji strategi pemerintah desa dalam menangani permasalahan sampah berdasarkan kondisi empiris di Desa Tinggede. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melihat aspek teknis, tetapi juga mengkaji aspek strategis dalam tata kelola pemerintahan desa.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui strategi pemerintah Desa Tinggede dalam menangani permasalahan sampah, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam implementasi strategi tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ilmu pemerintahan, khususnya dalam bidang kebijakan publik dan pengelolaan lingkungan di tingkat desa, serta menjadi referensi bagi pemerintah desa lain dalam merumuskan strategi pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam strategi pemerintah desa dalam menangani permasalahan sampah di Desa Tinggede Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti menggali makna, peran, serta upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan observasi lapangan. Wawancara dilakukan secara tatap muka dengan informan yang telah ditentukan, yaitu Kepala Desa, aparat desa, tokoh masyarakat, serta warga Desa Tinggede. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu penentuan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang dianggap mampu memberikan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian.

Observasi dilakukan secara langsung di Desa Tinggede guna melihat kondisi

lingkungan serta praktik pengelolaan sampah yang berlangsung di masyarakat. Melalui observasi ini, peneliti memperoleh gambaran nyata mengenai situasi di lapangan yang tidak selalu dapat diperoleh melalui wawancara.

Selain data primer, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui teknik dokumentasi. Data sekunder meliputi arsip desa, peraturan terkait pengelolaan sampah, laporan kegiatan, serta dokumen lain yang relevan dengan penelitian. Data ini digunakan sebagai pendukung untuk memperkuat dan melengkapi data primer.

Analisis data dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan sejak proses pengumpulan data hingga penelitian selesai. Tahapan analisis mengacu pada model Miles and Huberman (2014), analisis data kualitatif dilakukan melalui tiga alur kegiatan yang saling berkaitan, yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), serta penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing/verification*). Reduksi data merupakan proses memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data yang relevan dengan fokus penelitian (Miles, Huberman and Saldaña, 2014).

Hasil

1. Tujuan (*Purpose*)

Tujuan menurut Teori Geoff Mulgan (2009) merupakan arah utama pemerintah desa dalam pengelolaan sampah adalah menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan melalui peningkatan peran pemerintah desa dalam pengelolaan sampah, penyediaan fasilitas, serta pelibatan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan (Mulgan, 2009).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Tinggede, Bapak Alfathan, diperoleh informasi bahwa *“Tujuan utama pemerintah desa adalah mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan bebas dari pencemaran serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah yang baik... terdapat himbauan dari Bupati Sigi dalam rangka menuju Adipura”* (Wawancara, 16 Desember 2025).

Temuan ini menunjukkan bahwa tujuan pemerintah desa tidak hanya berorientasi pada kebersihan lingkungan, tetapi juga pada peningkatan kualitas kesehatan masyarakat serta dukungan terhadap agenda pemerintah daerah dalam meraih penghargaan Adipura. Komitmen tersebut diwujudkan melalui upaya penguatan kesadaran masyarakat, penyediaan sarana pendukung, serta pembentukan regulasi di tingkat desa.

Selanjutnya, hasil wawancara dengan perwakilan Dinas Lingkungan Hidup, Bapak Radiksa, mengungkapkan bahwa *“Penanganan sampah difokuskan pada pengelolaan di tingkat masyarakat melalui pemilahan, sehingga volume sampah ke TPA dapat dikurangi”* (Wawancara, 10 Desember 2025). Pernyataan tersebut menegaskan bahwa orientasi kebijakan pengelolaan sampah tidak lagi berfokus pada pengangkutan semata, melainkan pada pengurangan sampah dari sumbernya (*waste reduction at source*). Strategi ini menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam proses pengelolaan sampah, khususnya melalui pemilahan dan pengolahan sampah secara

mandiri.

Namun demikian, berdasarkan wawancara dengan tokoh masyarakat, Bapak Faisal, ditemukan bahwa *“Tujuan pemerintah desa sudah sesuai dengan kebutuhan warga, namun penyampaiannya belum maksimal”* (Wawancara, 16 Januari 2025). Hal ini menunjukkan adanya kendala dalam aspek komunikasi kebijakan, di mana informasi terkait tujuan dan program pengelolaan sampah belum tersampaikan secara merata kepada seluruh masyarakat. Akibatnya, tingkat pemahaman dan partisipasi masyarakat masih belum optimal. Sejalan dengan itu, Ketua RT juga menyampaikan bahwa *“Tujuan pemerintah desa sudah disampaikan kepada warga, namun hasilnya belum sepenuhnya dirasakan”* (Wawancara, 18 Januari 2025).

Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun proses sosialisasi telah dilakukan, implementasi di tingkat masyarakat masih menghadapi tantangan, terutama dalam mengubah perilaku masyarakat menjadi lebih peduli terhadap pengelolaan sampah. Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa terdapat keselarasan persepsi antara pemerintah desa, Dinas Lingkungan Hidup, dan masyarakat terkait tujuan pengelolaan sampah, yaitu menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat serta mendukung pencapaian Adipura. Namun, hasil observasi peneliti menunjukkan bahwa tujuan tersebut belum sepenuhnya tercapai secara optimal.

Beberapa kendala yang ditemukan di lapangan meliputi: (1) belum konsistennya masyarakat dalam melakukan pemilahan sampah, (2) keterbatasan fasilitas pendukung, serta (3) belum optimalnya sosialisasi program kepada seluruh lapisan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan (*policy goals*) dengan implementasinya (*policy implementation*).

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rosadi, 2023) yang menyatakan bahwa keberhasilan strategi pengelolaan sampah sangat dipengaruhi oleh ketersediaan fasilitas, teknologi pengelolaan, serta partisipasi masyarakat. Dalam penelitiannya, digunakan analisis SWOT yang dikemukakan oleh David Hunger, yang menekankan pentingnya optimalisasi kekuatan dan peluang dalam menghadapi tantangan pengelolaan sampah. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa meskipun tujuan kebijakan telah dirumuskan secara tepat dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, keberhasilan pencapaiannya sangat bergantung pada efektivitas sosialisasi, ketersediaan sarana prasarana, serta tingkat partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah di tingkat lokal.

2. Lingkungan (*Environments*)

Lingkungan (*environments*) merupakan konteks sosial, budaya, ekonomi, serta kapasitas kelembagaan yang mempengaruhi keberhasilan suatu strategi kebijakan. Menurut Teori Geoff Mulgan (2009), faktor lingkungan menjadi elemen penting dalam implementasi kebijakan karena kondisi sosial, ekonomi, dan politik di lingkungan masyarakat sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan di tingkat lapangan. Lingkungan yang mendukung akan memperkuat efektivitas implementasi,

sedangkan lingkungan yang kurang kondusif dapat menjadi hambatan dalam pencapaian tujuan kebijakan (Mulgan, 2009).

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Tinggede, Kecamatan Marawola, kondisi lingkungan sosial dan budaya masyarakat menunjukkan bahwa tingkat kesadaran terhadap pengelolaan sampah masih relatif rendah. Hal ini terlihat dari masih ditemukannya perilaku membuang dan membakar sampah secara sembarangan di lingkungan permukiman. Sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris Desa bahwa *“Masyarakat yang peduli terhadap pengelolaan sampah masih sekitar 35% dari total ±10.000 jiwa, sementara sebagian lainnya masih sering membakar sampah sembarangan... keterbatasan TPS, armada pengangkut, dan petugas kebersihan menjadi kendala utama”* (Wawancara, 16 Desember 2025). Pernyataan ini menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran masyarakat berjalan beriringan dengan keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan sampah.

Kondisi tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa *“Permasalahan utama bukan hanya fasilitas, tetapi juga kebiasaan masyarakat... sebagian warga menghindari retribusi sampah dan memilih membuang sampah sembarangan”* (Wawancara, 10 Desember 2025). Hal ini menunjukkan bahwa faktor budaya dan pola pikir masyarakat menjadi hambatan signifikan dalam pengelolaan sampah, khususnya terkait rendahnya kepatuhan terhadap kewajiban retribusi yang masih dipersepsikan sebagai beban, bukan sebagai tanggung jawab kolektif.

Senada dengan hal tersebut, Ketua RT menyampaikan bahwa *“Permasalahan sampah masih terjadi akibat kebiasaan warga yang belum disiplin, meskipun lingkungan sosial cukup mendukung”* (Wawancara, 16 Januari 2026). Temuan ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara kondisi sosial yang relatif harmonis dengan perilaku individu dalam menjaga kebersihan lingkungan. Artinya, dukungan sosial yang ada belum sepenuhnya mampu mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Selain itu, tokoh masyarakat juga menegaskan bahwa *“Permasalahan sampah masih cukup serius karena rendahnya kesadaran masyarakat dan keterbatasan fasilitas”* (Wawancara, 18 Januari 2026). Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa permasalahan lingkungan di Desa Tinggede dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu rendahnya kesadaran dan kedisiplinan masyarakat serta keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan sampah.

Hasil observasi lapangan turut memperkuat temuan tersebut, di mana masih ditemukan praktik pembakaran sampah di pekarangan rumah, pembuangan sampah di lahan kosong, serta rendahnya pemanfaatan layanan pengangkutan sampah. Selain itu, faktor eksternal seperti pertumbuhan permukiman dan meningkatnya aktivitas kendaraan berat juga turut memperburuk kondisi lingkungan di wilayah penelitian.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tantangan utama dalam pengelolaan sampah di Desa Tinggede lebih dominan pada aspek perilaku (*behavioral issues*). Permasalahan sampah tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan erat

dengan budaya, kebiasaan, dan pola pikir masyarakat. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Rosadi, 2023), yang menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah dipengaruhi oleh kekuatan kelembagaan, ketersediaan fasilitas, serta partisipasi masyarakat. Hal ini memperkuat bahwa keberhasilan strategi pengelolaan sampah tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis, tetapi juga oleh faktor sosial dan kelembagaan.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa efektivitas strategi pengelolaan sampah di Desa Tinggede sangat bergantung pada dua aspek utama, yaitu peningkatan kesadaran masyarakat melalui edukasi yang berkelanjutan serta penguatan sarana dan prasarana pendukung. Tanpa adanya perubahan perilaku masyarakat dan dukungan infrastruktur yang memadai, strategi yang dirumuskan akan sulit mencapai hasil yang optimal.

3. Pengarahan (*Direction*)

Pengarahan (*direction*) merupakan proses menggerakkan seluruh pihak untuk mencapai tujuan melalui komunikasi, koordinasi, motivasi, dan instruksi. Menurut Teori Geoff Mulgan (2009), keberhasilan strategi tidak hanya ditentukan oleh perumusan tujuan kebijakan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan aktor-aktor kebijakan dalam mengarahkan, mengoordinasikan, dan memastikan implementasi kebijakan berjalan sesuai dengan rencana di tingkat pelaksana. Peran aktor menjadi penting karena implementasi kebijakan pada dasarnya merupakan proses interaksi antaraktor yang menentukan keberhasilan kebijakan di lapangan (Mulgan, 2009).

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Tinggede, Kecamatan Marawola, fungsi pengarahan oleh pemerintah desa telah dilakukan melalui berbagai bentuk komunikasi, seperti imbauan langsung, forum masyarakat, serta koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan Dinas Lingkungan Hidup. Namun, pola pengarahan tersebut masih bersifat insidental dan belum terprogram secara sistematis. Hasil wawancara dengan Kepala Desa menunjukkan bahwa *“Sosialisasi terkait sampah selalu disampaikan melalui masjid dan pertemuan masyarakat, karena sampah menjadi prioritas utama, namun kesadaran dan aturan yang menekan masih lemah”* (Wawancara, 16 Desember 2025).

Temuan ini menunjukkan bahwa pemerintah desa telah menempatkan isu pengelolaan sampah sebagai prioritas utama dan secara aktif melakukan komunikasi kepada masyarakat. Akan tetapi, pendekatan yang digunakan masih bersifat persuasif dan belum didukung oleh regulasi yang memiliki daya paksa, sehingga belum mampu mendorong perubahan perilaku secara signifikan. Selanjutnya, hasil wawancara dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup mengungkapkan bahwa *“Telah dilakukan sosialisasi, pengajuan TPS 3R, serta peninjauan Peraturan Desa terkait retribusi sampah yang masih dalam proses”* (Wawancara, 10 Desember 2025).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa arah kebijakan mulai bergeser dari sekadar sosialisasi menuju penguatan sistem pengelolaan sampah melalui penyediaan

fasilitas dan regulasi. Upaya pembentukan TPS 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) serta revisi Peraturan Desa menjadi langkah strategis dalam menciptakan sistem pengelolaan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. Namun, karena masih dalam tahap perencanaan dan pengembangan, implementasinya belum memberikan dampak signifikan di tingkat masyarakat. Di tingkat lokal, Ketua RT menyampaikan bahwa *“Pengarahan dilakukan melalui ajakan kerja bakti dan koordinasi dengan pemerintah desa terkait pengangkutan sampah”* (Wawancara, 16 Januari 2026).

Hal ini menunjukkan bahwa pengarahan di tingkat RT lebih menekankan pada pendekatan partisipatif melalui kegiatan gotong royong. Pendekatan ini efektif dalam membangun keterlibatan masyarakat, namun masih bersifat insidental dan belum didukung oleh sistem kerja yang terjadwal secara rutin. Sementara itu, tokoh masyarakat mengungkapkan bahwa *“Kegiatan pengelolaan sampah masih didominasi oleh kerja bakti dan pengangkutan yang belum rutin”* (Wawancara, 18 Januari 2026).

Temuan ini mengindikasikan bahwa pola pengarahan yang dilakukan pemerintah desa masih berfokus pada kegiatan sesaat, sehingga belum mampu menciptakan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Ketidakpastian jadwal pengangkutan juga menjadi faktor yang memicu kembali perilaku membuang sampah secara sembarangan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa fungsi pengarahan oleh Kepala Desa dan perangkat desa telah berjalan melalui komunikasi, koordinasi, dan pendekatan partisipatif. Namun, terdapat beberapa kelemahan utama, yaitu: (1) pengarahan masih bersifat insidental, (2) belum didukung oleh regulasi yang tegas, dan (3) belum adanya sistem operasional yang terjadwal secara konsisten. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengarahan tidak hanya bergantung pada intensitas komunikasi, tetapi juga pada kekuatan regulasi dan konsistensi implementasi. Tanpa adanya aturan yang mengikat dan sistem yang terstruktur, pengarahan yang dilakukan cenderung tidak mampu mengubah perilaku masyarakat secara permanen.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Rosadi, 2023) yang menggunakan analisis SWOT dari David Hunger. Penelitian tersebut menekankan pentingnya penguatan strategi melalui kombinasi antara kebijakan, fasilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa peningkatan efektivitas pengarahan di Desa Tinggede memerlukan integrasi antara sosialisasi yang berkelanjutan, penguatan regulasi desa, serta penerapan sistem pengelolaan sampah yang terjadwal dan konsisten. Pendekatan ini diharapkan mampu mendorong perubahan perilaku masyarakat secara lebih optimal dan berkelanjutan.

4. Tindakan (*Action*)

Tindakan (*Action*) merupakan bentuk implementasi nyata dari strategi pemerintah yang diwujudkan melalui program dan kegiatan operasional. Menurut Teori Geoff Mulgan (2009), keberhasilan strategi sangat ditentukan oleh kemampuan

pemerintah dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam tindakan yang terstruktur dan berkelanjutan, karena implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada formulasi kebijakan, tetapi juga pada proses pelaksanaan yang melibatkan aktor, organisasi, serta mekanisme kerja yang sistematis dalam mencapai tujuan kebijakan di lapangan (Mulgan, 2009).

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Tinggede, Kecamatan Marawola, tindakan pemerintah desa dalam pengelolaan sampah telah dilakukan melalui beberapa kegiatan, seperti pengangkutan sampah, kerja bakti lingkungan, pemasangan imbauan kebersihan, serta koordinasi dengan perangkat desa dan Dinas Lingkungan Hidup. Namun, pelaksanaan tindakan tersebut belum berjalan secara konsisten dan belum terintegrasi dalam sistem yang kuat. Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa menunjukkan bahwa *“Mekanisme sudah diatur melalui kerja sama dengan RT, namun kembali lagi pada kurangnya kesadaran masyarakat”* (Wawancara, 15 Desember 2025).

Temuan ini menunjukkan bahwa secara administratif pemerintah desa telah memiliki mekanisme pengelolaan sampah, tetapi implementasinya belum optimal akibat rendahnya partisipasi masyarakat. Dalam praktiknya, partisipasi warga masih terbatas pada kepentingan individu, seperti membersihkan area di sekitar rumah masing-masing, tanpa memperhatikan kebersihan ruang publik secara menyeluruh. Selanjutnya, hasil wawancara dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup mengungkapkan bahwa *“Sedang dilakukan peninjauan Peraturan Desa terkait retribusi sampah agar selaras dengan Peraturan Daerah”* (Wawancara, 10 Desember 2025).

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya upaya penguatan aspek regulasi sebagai dasar hukum dalam pengelolaan sampah. Sinkronisasi antara Peraturan Desa dan Peraturan Daerah menjadi langkah penting untuk menciptakan sistem yang memiliki daya ikat terhadap masyarakat. Namun, karena proses tersebut masih berlangsung, implementasi kebijakan di lapangan belum sepenuhnya didukung oleh aturan yang tegas dan sanksi yang jelas. Di tingkat lokal, Ketua RT menyampaikan bahwa *“Koordinasi dengan pemerintah desa terus dilakukan dan mulai terlihat perubahan perilaku warga, meskipun belum konsisten”* (Wawancara, 16 Januari 2026).

Hal ini menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan melalui pendekatan partisipatif mulai memberikan dampak positif terhadap perubahan perilaku masyarakat. Namun, perubahan tersebut masih bersifat sementara dan belum merata di seluruh lapisan masyarakat. Sementara itu, tokoh masyarakat mengungkapkan bahwa *“Tindakan pemerintah desa lebih banyak berupa kerja bakti dan pemasangan papan larangan, namun belum dilakukan secara berkelanjutan”* (Wawancara, 18 Januari 2026).

Temuan ini mengindikasikan bahwa tindakan yang dilakukan masih bersifat insidental dan belum menjadi sistem operasional yang berjalan secara rutin. Kegiatan kerja bakti dan pemasangan imbauan belum mampu memberikan dampak jangka panjang tanpa adanya pengawasan dan tindak lanjut yang konsisten.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa tindakan pemerintah desa dalam pengelolaan sampah telah menunjukkan adanya komitmen melalui berbagai kegiatan operasional. Namun, terdapat beberapa kendala

utama, yaitu: (1) rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat, (2) keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas pendukung, serta (3) belum adanya regulasi desa yang efektif dan memiliki mekanisme sanksi yang jelas.

Temuan ini menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan belum sepenuhnya mampu mengubah perilaku masyarakat secara berkelanjutan. Tanpa adanya sistem yang terjadwal, pengawasan yang rutin, serta dukungan regulasi yang kuat, implementasi kebijakan cenderung berjalan tidak optimal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Rosadi, 2023) yang menggunakan analisis SWOT dari David Hunger. Penelitian tersebut menekankan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah sangat dipengaruhi oleh ketersediaan fasilitas, kekuatan kelembagaan, serta partisipasi aktif masyarakat.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa efektivitas tindakan dalam pengelolaan sampah di Desa Tinggede memerlukan penguatan pada aspek konsistensi pelaksanaan, penyediaan sarana prasarana, serta pembentukan regulasi yang memiliki daya ikat. Integrasi antara tindakan operasional yang rutin dan dukungan kebijakan yang kuat diharapkan mampu mendorong perubahan perilaku masyarakat secara lebih optimal dan berkelanjutan.

5. Pembelajaran (*Learning*)

Pembelajaran (*learning*) merupakan proses refleksi yang dilakukan oleh pemerintah dalam menilai efektivitas strategi yang telah dijalankan. Menurut Teori Geoff Mulgan (2009), pembelajaran menjadi elemen penting dalam siklus kebijakan karena memungkinkan adanya proses evaluasi dan umpan balik yang digunakan untuk memperbaiki kebijakan secara berkelanjutan (Mulgan, 2009).

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Tinggede, Kecamatan Marawola, aspek pembelajaran dalam pengelolaan sampah mulai menunjukkan adanya kesadaran reflektif dari berbagai pihak, meskipun belum sepenuhnya terlembagakan dalam sistem yang terstruktur. Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa menunjukkan bahwa: *"Permasalahan utama terletak pada pola pikir masyarakat... perlu pendekatan yang lebih dekat dan berkelanjutan, sementara program operasional seperti padat karya sudah tidak aktif"* (Wawancara, 16 Desember 2025).

Temuan ini menunjukkan bahwa pemerintah desa mulai menyadari bahwa permasalahan sampah tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan pola pikir dan perilaku masyarakat. Pendekatan yang selama ini dilakukan melalui imbauan formal dinilai belum cukup efektif, sehingga diperlukan metode edukasi yang lebih persuasif dan menyentuh aspek sosial serta emosional masyarakat. Selain itu, tidak aktifnya program padat karya serta keterbatasan anggaran menyebabkan dukungan operasional dalam pengelolaan sampah belum optimal. *Selanjutnya, pihak Dinas Lingkungan Hidup mengungkapkan bahwa "Koordinasi dengan desa berjalan baik, namun diperlukan peningkatan proaktivitas pemerintah desa serta penguatan melalui Alokasi Dana Desa"* (Wawancara, 10 Desember 2025).

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya pembelajaran bahwa keberhasilan

strategi tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga oleh komitmen dan inisiatif pemerintah desa dalam mengelola program lingkungan. Integrasi program pengelolaan sampah ke dalam Alokasi Dana Desa (ADD) menjadi langkah strategis untuk menjamin keberlanjutan pembiayaan dan operasional kegiatan. Di tingkat RT, Ketua RT menyampaikan bahwa *“Kerja sama antara pemerintah desa dan masyarakat sangat penting, serta diperlukan sistem yang lebih jelas dan fasilitas yang memadai”* (Wawancara, 16 Januari 2026).

Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran yang diperoleh di tingkat lokal menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Sinergi antara kebijakan dan partisipasi warga menjadi kunci dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang efektif. Sementara itu, tokoh masyarakat mengungkapkan bahwa *“Program pengelolaan sampah mulai menumbuhkan kesadaran, meskipun belum merata, dan diharapkan ke depan sistem dapat lebih terstruktur”* (Wawancara, 18 Januari 2026).

Temuan ini menunjukkan adanya perubahan awal dalam pola pikir masyarakat, meskipun belum berlangsung secara konsisten. Kesadaran yang mulai tumbuh perlu diperkuat melalui sistem yang lebih terorganisir agar dapat menghasilkan perubahan perilaku yang berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran dalam strategi pengelolaan sampah di Desa Tinggede menghasilkan beberapa poin penting, yaitu: (1) perlunya perubahan pola pikir masyarakat melalui edukasi berkelanjutan, (2) pentingnya penguatan regulasi desa sebagai dasar hukum, (3) perlunya dukungan anggaran yang memadai melalui ADD, serta (4) pentingnya kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat.

Temuan ini menunjukkan bahwa pembelajaran yang terjadi telah mengarah pada kesadaran akan pentingnya pendekatan yang lebih komprehensif, tidak hanya berbasis sosialisasi, tetapi juga mencakup aspek regulasi, pendanaan, dan sistem operasional. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Rosadi, 2023) yang menggunakan analisis SWOT dari David Hunger. Penelitian tersebut menegaskan bahwa keberhasilan strategi pengelolaan sampah sangat dipengaruhi oleh kemampuan organisasi dalam memanfaatkan kekuatan, mengatasi kelemahan, serta merespons peluang dan tantangan yang ada.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa proses pembelajaran dalam pengelolaan sampah di Desa Tinggede telah mengarah pada upaya perbaikan strategi yang lebih adaptif dan berkelanjutan. Namun, agar pembelajaran tersebut memberikan dampak nyata, diperlukan tindak lanjut berupa implementasi kebijakan yang konsisten, penguatan kelembagaan, serta pembangunan sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi.

Pembahasan

1. Analisis Implementasi Tujuan Kebijakan Pengelolaan Sampah

Tujuan dalam kebijakan publik merupakan elemen fundamental yang

menentukan arah tindakan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat. Teori Geoff Mulgan (2009) menekankan bahwa tujuan kebijakan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menjadi dasar dalam mengarahkan implementasi program agar tetap selaras dengan kebutuhan publik (Mulgan, 2009).

Dalam konteks pengelolaan sampah di Desa Tinggede, tujuan yang dirumuskan pemerintah desa pada dasarnya telah sejalan dengan prinsip *sustainable environmental governance*, yaitu menciptakan lingkungan bersih, sehat, dan berkelanjutan melalui pengurangan pencemaran dan peningkatan kesadaran masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa secara konseptual, arah kebijakan sudah berada pada jalur yang tepat karena menempatkan aspek kesehatan lingkungan dan partisipasi masyarakat sebagai fokus utama.

Namun, dalam perspektif implementasi kebijakan, kesesuaian tujuan tidak selalu berbanding lurus dengan keberhasilan pelaksanaan. (Sangkop, Pati and Egeten, 2023) menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh komunikasi yang efektif antara aktor kebijakan dan kelompok sasaran. Komunikasi yang tidak berjalan dengan baik dapat menyebabkan informasi kebijakan tidak tersampaikan secara merata, sehingga pemahaman masyarakat terhadap tujuan kebijakan menjadi terbatas dan bersifat parsial.

Selain itu, tujuan pengelolaan sampah yang menekankan pengurangan beban *final disposal* (TPA) juga mencerminkan penerapan konsep *waste hierarchy* yang menempatkan pengurangan dan pemilahan sampah di tingkat sumber sebagai prioritas utama. (Apriani, Liquiddanu and Hisjam, 2025) menjelaskan bahwa Keberlanjutan sistem pengelolaan sampah hanya dapat dicapai apabila terjadi perubahan perilaku masyarakat, khususnya dalam hal pemilahan sampah sejak dari sumbernya yaitu rumah tangga. Partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah menjadi faktor kunci dalam mendukung pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

Namun demikian, efektivitas pencapaian tujuan tersebut masih menghadapi tantangan pada aspek internalisasi nilai kebijakan ke dalam perilaku masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan formal kebijakan dengan realitas implementasi di lapangan. Dalam perspektif *policy implementation gap*, kondisi ini umum terjadi ketika tujuan kebijakan belum didukung oleh instrumen sosialisasi dan fasilitas yang memadai.

Lebih lanjut, keberhasilan tujuan kebijakan juga sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat. Menurut (Kambuam, 2024), kebijakan publik tidak akan mencapai hasil yang optimal apabila masyarakat hanya diposisikan sebagai objek dalam implementasi kebijakan. Oleh karena itu, masyarakat perlu dilibatkan sebagai subjek aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan.

Dengan demikian, dapat dianalisis bahwa tujuan pengelolaan sampah di Desa Tinggede telah memiliki kesesuaian normatif dengan prinsip kebijakan lingkungan berkelanjutan, namun masih menghadapi tantangan pada aspek implementasi,

khususnya dalam hal komunikasi kebijakan, perubahan perilaku masyarakat, dan dukungan fasilitas pendukung.

2. Analisis Faktor Lingkungan dalam Implementasi Pengelolaan Sampah

Lingkungan dalam konteks implementasi kebijakan publik tidak hanya dipahami sebagai kondisi fisik, tetapi juga mencakup aspek sosial, budaya, ekonomi, serta kapasitas kelembagaan yang mempengaruhi keberhasilan suatu strategi. Menurut (Widiasih, Julina and Sekarsari, 2024), lingkungan kebijakan merupakan faktor eksternal yang dapat memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, baik memperkuat maupun melemahkan proses implementasi. Tingkat keberhasilan tersebut sangat bergantung pada kesesuaian antara kebijakan yang dirumuskan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat sebagai lingkungan pelaksana kebijakan.

Dalam konteks pengelolaan sampah di Desa Tinggede, lingkungan sosial dan budaya masyarakat menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan signifikan dalam membentuk perilaku kolektif yang ramah lingkungan. Hal ini berkaitan dengan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah yang baik, yang ditandai dengan masih ditemukannya praktik membuang dan membakar sampah secara sembarangan.

Menurut (Mulasari, 2013), perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah sangat dipengaruhi oleh pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap lingkungan. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan sampah tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga bersifat kultural (*behavioral problem*), sehingga membutuhkan pendekatan perubahan perilaku yang berkelanjutan.

Selain itu, faktor sosial seperti keberadaan pendatang baru juga turut mempengaruhi dinamika kebiasaan masyarakat. Perbedaan latar belakang sosial menyebabkan tidak adanya standar perilaku yang seragam dalam pengelolaan sampah. Keberagaman sosial (*social heterogeneity*) dalam suatu wilayah dapat memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan publik. Kondisi masyarakat yang heterogen, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun budaya, dapat menciptakan perbedaan persepsi dan kepentingan yang berimplikasi pada tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan di lapangan (Mahayani, 2025).

Dari aspek ekonomi kelembagaan, persoalan retribusi sampah juga menjadi faktor yang mempengaruhi perilaku masyarakat. Sebagian masyarakat masih memandang retribusi sebagai beban biaya, bukan sebagai bentuk tanggung jawab kolektif dalam menjaga kebersihan lingkungan. Padahal, menurut Winarno (2016), keberhasilan kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh tingkat penerimaan masyarakat terhadap instrumen kebijakan yang diterapkan pemerintah.

Di sisi lain, keterbatasan sarana dan prasarana seperti Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan armada pengangkut sampah memperkuat kompleksitas permasalahan lingkungan. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Desa Tinggede belum sepenuhnya didukung oleh kapasitas

infrastruktur yang memadai. Menurut (Widiprana, Ludigdo and Rosidi, 2017), Ketersediaan sumber daya merupakan salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan publik. Sumber daya yang dimaksud mencakup sumber daya manusia, anggaran, informasi, kewenangan, serta sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Secara konseptual, kondisi lingkungan di Desa Tinggede juga menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara *policy intention* dan *policy reality*. Meskipun pemerintah desa telah melakukan berbagai upaya sosialisasi, namun perubahan perilaku masyarakat masih berjalan lambat. Hal ini menunjukkan bahwa aspek lingkungan sosial budaya memiliki pengaruh yang lebih dominan dibandingkan intervensi kebijakan formal. Dengan demikian, lingkungan dalam konteks ini tidak hanya menjadi latar belakang kebijakan, tetapi juga menjadi faktor penentu utama keberhasilan strategi pengelolaan sampah berbasis masyarakat (*community-based waste management*).

3. Analisis Fungsi Pengarahan dalam Implementasi Pengelolaan Sampah

Pengarahan dalam implementasi kebijakan publik merupakan proses penting dalam menggerakkan seluruh aktor yang terlibat agar tujuan kebijakan dapat tercapai melalui komunikasi, koordinasi, motivasi, dan pengawasan yang terarah. (Sutmasa, 2021) menegaskan bahwa komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi merupakan faktor kunci implementasi kebijakan. Dalam konteks pengelolaan sampah di Desa Tinggede, fungsi pengarahan telah dilakukan melalui berbagai bentuk komunikasi seperti imbauan langsung kepada masyarakat, forum desa, serta koordinasi dengan pihak kecamatan dan Dinas Lingkungan Hidup. Namun, jika dianalisis lebih dalam, pola pengarahan tersebut masih bersifat persuasif, insidental, dan belum terstruktur dalam sebuah sistem kebijakan yang berkelanjutan sehingga belum mampu mendorong perubahan perilaku masyarakat secara menyeluruh.

Menurut temuan oleh (Sangkop, Pati and Egeten, 2023) menyatakan bahwa komunikasi kebijakan tidak akan efektif dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat apabila tidak disertai dengan pengawasan, koordinasi, serta penguatan kelembagaan dalam proses implementasi. Hal ini karena keberhasilan implementasi kebijakan menuntut adanya kontrol yang memastikan kebijakan berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Kondisi ini terlihat dalam implementasi pengarahan di Desa Tinggede, di mana sosialisasi yang dilakukan secara berulang melalui berbagai forum sosial belum sepenuhnya mampu membentuk budaya disiplin dalam pengelolaan sampah. Meskipun pemerintah desa telah menempatkan isu sampah sebagai prioritas utama dan menyampaikannya dalam berbagai kesempatan seperti di masjid maupun pertemuan masyarakat, namun pendekatan yang hanya mengandalkan imbauan belum memberikan dampak signifikan terhadap perubahan perilaku warga. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara intensitas komunikasi kebijakan dengan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan tersebut.

Dari perspektif implementasi kebijakan, kondisi ini juga mencerminkan lemahnya aspek *policy enforcement*, di mana aturan yang ada belum memiliki daya ikat yang kuat untuk mengubah perilaku masyarakat secara kolektif. Menurut (Aritonang, 2011), Kebijakan publik tidak hanya menuntut adanya komunikasi yang efektif, tetapi juga memerlukan dukungan instrumen regulasi yang jelas dan tegas sebagai alat pengendali (kontrol) untuk mengarahkan perilaku masyarakat sesuai dengan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam kasus ini, upaya pemerintah desa yang mulai mengarah pada penguatan regulasi seperti peninjauan Peraturan Desa mengenai retribusi sampah serta rencana pengadaan TPS 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) menunjukkan adanya kesadaran bahwa pendekatan persuasif saja tidak cukup untuk menyelesaikan permasalahan sampah secara berkelanjutan. (Adinugraha and Masruchin, 2024) juga menegaskan bahwa sistem pengelolaan sampah yang efektif harus mengintegrasikan edukasi masyarakat, penyediaan infrastruktur, serta regulasi yang jelas dan tegas dalam satu kesatuan sistem yang saling mendukung. Ketiga aspek tersebut menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah berbasis masyarakat dan keberlanjutan lingkungan

Di tingkat implementasi lokal, peran perangkat desa dan RT dalam memberikan pengarahan melalui kegiatan kerja bakti serta koordinasi pengangkutan sampah mencerminkan adanya pendekatan berbasis partisipasi masyarakat atau *community-based governance*. Namun demikian, kegiatan tersebut masih bersifat insidental dan belum terjadwal secara konsisten, sehingga dampaknya lebih bersifat sementara dan belum mampu menciptakan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Ketidakkonsistenan ini menyebabkan masyarakat belum memiliki kepastian perilaku yang stabil dalam menjaga kebersihan lingkungan, sehingga kebiasaan lama seperti membuang dan membakar sampah masih terus terjadi.

Secara keseluruhan, dapat dianalisis bahwa fungsi pengarahan dalam pengelolaan sampah di Desa Tinggede sudah berjalan melalui komunikasi dan koordinasi lintas aktor, namun masih didominasi oleh pendekatan persuasif yang belum didukung oleh regulasi yang kuat, sistem pengawasan yang konsisten, serta program operasional yang terstruktur. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dalam bentuk integrasi antara edukasi berkelanjutan, regulasi desa yang mengikat, serta sistem pengelolaan sampah yang berjalan secara rutin agar fungsi pengarahan dapat lebih efektif dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat secara berkelanjutan.

4. Analisis Implementasi Tindakan Pengelolaan Sampah

Tindakan dalam implementasi kebijakan publik merupakan bentuk nyata dari strategi pemerintah yang diwujudkan melalui program dan aktivitas operasional di lapangan. (Arisainge, 2016) menegaskan bahwa implementasi kebijakan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Kota Pontianak belum berjalan secara efektif. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor utama. Pertama, aspek komunikasi yang belum optimal karena sosialisasi mengenai bahaya narkoba dan peran masyarakat dalam pencegahan belum dilakukan secara intensif dan menyeluruh

kepada seluruh lapisan masyarakat. Kedua, keterbatasan sumber daya, baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana, maupun pendanaan, yang masih belum memadai untuk mendukung pelaksanaan kebijakan secara maksimal. Ketiga, aspek disposisi, yaitu komitmen dan motivasi aparat Kepolisian dan BNN yang belum sepenuhnya didukung oleh pemerintah daerah. Keempat, struktur birokrasi yang masih lemah karena koordinasi antar stakeholder terkait belum berjalan dengan baik, sehingga menghambat efektivitas pelaksanaan kebijakan. Dalam konteks pengelolaan sampah di Desa Tinggede, tindakan pemerintah desa telah diwujudkan melalui berbagai kegiatan seperti pengangkutan sampah, kerja bakti lingkungan, koordinasi dengan perangkat RT, serta pemasangan imbauan kebersihan di ruang publik. Namun demikian, jika dianalisis lebih mendalam, tindakan tersebut belum berjalan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga belum mampu memberikan dampak yang optimal terhadap perubahan perilaku masyarakat.

Temuan tersebut diperkuat oleh penelitian (Rusdin, 2021) mengenai implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Palu berdasarkan teori Edward III. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah belum berjalan optimal karena sosialisasi yang dilakukan pemerintah belum menyeluruh, keterbatasan sarana dan prasarana, lemahnya komitmen pelaksana kebijakan, serta koordinasi birokrasi yang belum maksimal hingga tingkat RT dan RW. Akibatnya, di beberapa wilayah belum terbentuk pengelola sampah sebagaimana yang diharapkan dalam regulasi. Temuan ini memiliki kesamaan dengan kondisi di Desa Tinggede, di mana tindakan pengelolaan sampah sudah dilakukan melalui berbagai aktivitas operasional, namun efektivitasnya masih terkendala oleh lemahnya koordinasi, keterbatasan fasilitas pendukung, dan rendahnya konsistensi pelaksanaan kebijakan di tingkat masyarakat.

Keterbatasan dalam pelaksanaan tindakan tersebut tidak terlepas dari faktor sumber daya manusia yang terbatas, minimnya fasilitas pendukung, serta belum adanya regulasi desa yang secara khusus dan tegas mengatur pengelolaan sampah. (Makmur, 2023) menyatakan bahwa implementasi kebijakan akan berjalan efektif apabila terdapat dukungan sistem yang terintegrasi antara regulasi, ketersediaan sumber daya, serta pelaksanaan operasional di lapangan. Ketiga komponen tersebut harus berjalan secara simultan agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal. Kondisi di Desa Tinggede menunjukkan bahwa meskipun sudah terdapat upaya kerja sama antara pemerintah desa dan RT dalam menjaga kebersihan lingkungan, namun efektivitasnya masih terbatas karena rendahnya kesadaran kolektif masyarakat. Partisipasi warga cenderung bersifat parsial dan lebih fokus pada lingkungan pribadi, bukan pada kebersihan ruang publik secara menyeluruh, sehingga tujuan kolektif pengelolaan sampah belum tercapai secara maksimal.

Selain itu, upaya pemerintah desa dalam melakukan peninjauan kembali Peraturan Desa terkait retribusi sampah yang disinkronkan dengan Peraturan Daerah menunjukkan adanya langkah menuju penguatan aspek hukum dalam pengelolaan sampah. (Wirawan, 2025) menjelaskan bahwa Kebijakan publik yang tidak didukung

oleh dasar hukum yang kuat akan sulit menciptakan kepatuhan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan regulasi menjadi elemen penting dalam memastikan bahwa kebijakan memiliki daya ikat yang jelas dan mampu mengarahkan perilaku masyarakat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Pada tingkat implementasi lokal, tindakan seperti kerja bakti dan koordinasi antara Ketua RT dan pemerintah desa mencerminkan adanya pendekatan berbasis partisipasi masyarakat atau *community participation*. Namun, UNEP (2016) menegaskan bahwa pengelolaan sampah berbasis masyarakat hanya akan efektif apabila didukung oleh tindakan yang konsisten, terjadwal, dan terintegrasi dalam sistem yang berkelanjutan. Dalam kondisi di Desa Tinggede, kegiatan tersebut masih bersifat insidental sehingga dampaknya terhadap perubahan perilaku masyarakat belum bersifat permanen, melainkan hanya sementara.

Secara keseluruhan, dapat dianalisis bahwa tindakan pemerintah desa dalam pengelolaan sampah sudah menunjukkan adanya komitmen melalui berbagai aktivitas operasional, namun belum sepenuhnya efektif karena masih terkendala oleh rendahnya konsistensi pelaksanaan, keterbatasan sumber daya, serta lemahnya dukungan regulasi yang mengikat. Selama tindakan kebijakan belum terintegrasi dalam sistem yang rutin, terstruktur, dan didukung oleh aturan yang kuat, maka perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah akan berjalan lambat dan belum merata.

5. Analisis Proses Pembelajaran dalam Pengelolaan Sampah

Pembelajaran dalam implementasi kebijakan publik merupakan proses reflektif yang digunakan pemerintah untuk menilai efektivitas strategi yang telah dijalankan serta menjadi dasar perbaikan kebijakan ke depan. (Hartono and Jauhari, 2020) menyatakan bahwa *policy learning* merupakan Bagian penting dalam siklus kebijakan publik adalah tahap evaluasi yang berfungsi sebagai mekanisme umpan balik (feedback) bagi pemerintah untuk melakukan penyesuaian kebijakan berdasarkan pengalaman implementasi di lapangan, sehingga kebijakan dapat diperbaiki dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks pengelolaan sampah di Desa Tinggede, pembelajaran menunjukkan bahwa permasalahan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh pola pikir dan perilaku masyarakat yang masih menganggap sampah sebagai persoalan yang tidak serius.

Temuan tersebut diperkuat oleh penelitian (Mufidah, Mustainah and Nawawi, 2024) mengenai manajemen pemungutan retribusi sampah di Kelurahan Taipa yang menunjukkan bahwa pengelolaan retribusi sampah belum berjalan efektif, khususnya pada aspek pengawasan (*controlling*). Penelitian tersebut menemukan bahwa belum adanya standar operasional pelaksanaan (*Standard Operating Procedure/SOP*) menyebabkan tidak adanya ukuran yang jelas dalam pelaksanaan dan evaluasi kegiatan. Selain itu, sosialisasi aplikasi pembayaran berbasis *online* melalui *pakagali.com* juga belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sehingga banyak masyarakat yang belum memahami sistem tersebut. Temuan ini memiliki keterkaitan

dengan kondisi di Desa Tinggede, di mana efektivitas pengelolaan sampah juga masih terkendala oleh rendahnya kesadaran masyarakat, lemahnya sistem operasional yang terstruktur, serta kurang optimalnya sosialisasi dan edukasi kebijakan kepada masyarakat secara menyeluruh.

Perubahan perilaku masyarakat tidak dapat dicapai hanya melalui pendekatan formal berupa imbauan, tetapi membutuhkan pendekatan yang lebih menyentuh aspek emosional dan sosial. (Sutmasa, 2021) menegaskan bahwa Efektivitas implementasi kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam memahami karakteristik sosial masyarakat sasaran, termasuk kondisi ekonomi, sosial, dan budaya. Oleh karena itu, strategi implementasi kebijakan harus bersifat kontekstual agar sesuai dengan kondisi lokal masyarakat. Kondisi di Desa Tinggede memperlihatkan bahwa rendahnya kesadaran masyarakat serta tidak aktifnya program Padat Karya menyebabkan pengelolaan sampah belum memiliki dukungan operasional yang stabil dan berkelanjutan.

Pembelajaran lain yang muncul adalah perlunya integrasi antara kebijakan, regulasi, dan pendanaan. Pemerintah desa mulai menyadari bahwa pengelolaan sampah tidak dapat hanya bergantung pada kegiatan insidental, tetapi harus didukung oleh alokasi anggaran yang jelas melalui Alokasi Dana Desa (*ADD*). (Fandi and Sunarto, 2021) menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh ketersediaan sumber daya, baik sumber daya manusia, sarana prasarana, maupun sumber daya finansial yang mendukung keberlanjutan program. Tanpa dukungan pendanaan yang memadai, pelaksanaan kebijakan tidak dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

Koordinasi antara pemerintah desa dan Dinas Lingkungan Hidup menunjukkan adanya proses pembelajaran dalam bentuk sinkronisasi kebijakan. Kondisi tersebut juga memperlihatkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga oleh komitmen aparatur dalam menjalankan kebijakan di tingkat lokal.

Perubahan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan mulai terlihat meskipun belum merata. Proses ini menunjukkan bahwa perubahan sosial membutuhkan waktu dan konsistensi dalam implementasi kebijakan. Ketidakmerataan perubahan perilaku mengindikasikan bahwa internalisasi nilai kebersihan belum sepenuhnya menjadi budaya masyarakat sehingga diperlukan edukasi yang berkelanjutan dan penguatan norma sosial.

Secara keseluruhan, pembelajaran dalam pengelolaan sampah di Desa Tinggede menunjukkan adanya perkembangan positif dalam kesadaran pemerintah dan masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan lingkungan. Pembelajaran tersebut juga menegaskan bahwa masih terdapat kelemahan pada aspek pola pikir masyarakat, keterbatasan sumber daya, serta belum optimalnya sistem operasional yang terstruktur. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan strategi yang lebih terintegrasi agar pengelolaan sampah dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas strategi Pemerintah Desa Tinggede dalam penanganan permasalahan sampah ditentukan oleh integrasi antara perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta partisipasi masyarakat. Temuan penelitian mengungkap bahwa strategi pengelolaan sampah belum berjalan optimal karena belum adanya sistem yang terintegrasi dalam implementasi kebijakan.

Kondisi tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan sarana dan prasarana, rendahnya kesadaran masyarakat, serta belum optimalnya penerapan regulasi dan sanksi. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan pengelolaan sampah tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan aspek kelembagaan dan sosial dalam tata kelola pemerintahan desa.

Secara ilmiah, penelitian ini memperkuat kajian sebelumnya bahwa keberhasilan pengelolaan sampah di tingkat lokal ditentukan oleh sinergi antara kapasitas pemerintah dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian ilmu pemerintahan, khususnya dalam implementasi strategi kebijakan lingkungan di tingkat desa.

Temuan penelitian ini berimplikasi pada praktik pemerintahan desa, terutama dalam penguatan kebijakan pengelolaan sampah yang terintegrasi, peningkatan partisipasi masyarakat, serta penegakan regulasi yang konsisten. Kebijakan ke depan perlu menekankan penguatan kelembagaan desa dan peningkatan kesadaran masyarakat sebagai bagian dari keberlanjutan lingkungan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada satu lokasi studi sehingga tidak dapat digeneralisasikan, serta ketergantungan pada data wawancara dan observasi yang bersifat subjektif. Selain itu, keterbatasan waktu penelitian membatasi analisis perubahan perilaku secara jangka panjang.

Penelitian ini merekomendasikan penguatan sarana dan prasarana, penegasan regulasi dengan sanksi yang konsisten, serta edukasi lingkungan berkelanjutan. Diperlukan pula kolaborasi antara pemerintah desa, masyarakat, dan pihak terkait untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang terpadu. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan studi komparatif atau pendekatan kuantitatif untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Muhammad Arief, S.IP., M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta masukan yang sangat berharga selama proses penelitian dan penulisan artikel ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Ibu Rusmawaty Bte Rusdin, S.Sos., M.A. atas dukungan, pendampingan, serta bantuan teknis yang telah diberikan sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Selain itu, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sigi, Kantor Desa Tinggede, Bapak Kepala Desa Tinggede, serta Sekretaris Desa Tinggede yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan kemudahan dalam

proses pengumpulan data. Penulis juga mengapresiasi semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses pengumpulan data, penyediaan akses informasi, serta fasilitas yang mendukung kelancaran penelitian ini.

Referensi

- Adinugraha, I.N.A.B. and Masruchin, F.R. (2024) "Analisis Kebutuhan Fasilitas Edukasi Pengelolaan Sampah berdasarkan Demografi Kabupaten Sidoarjo," *SADE : Jurnal Arsitektur, Planologi dan Teknik Sipil*, 3(1), pp. 12–18. Available at: <https://doi.org/10.29303/sade.v3i1.57>.
- Apriani, Y., Liquidanu, E. and Hisjam, M. (2025) "Tinjauan sistematis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pemilahan sampah rumah tangga," *Jurnal Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan (Journal of Environmental Sustainability Management)*, pp. 178–197. Available at: <https://doi.org/10.36813/jplb.9.2.178-197>.
- Arisainge, W. (2016) "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KOTA PONTIANAK," *PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 5(4). Available at: <https://jurmafis.untan.ac.id/index.php/publika/article/download/SuppFile/1212/738>.
- Aritonang, A.I. (2011) "Kebijakan Komunikasi di Indonesia: Gambaran Implementasi UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik," *Jurnal ASPIKOM*, 1(3), p. 261. Available at: <https://doi.org/10.24329/aspikom.v1i3.24>.
- Fandi, E.C. and Sunarto, S. (2021) "Perbandingan Dukungan Sumber Daya non Finansial di Puskesmas Salaman 1 dan Puskesmas Gamping 1 terhadap Pelaksanaan Spm Bidang Kesehatan," *Jurnal Manajemen Kesehatan Indonesia*, 9(2), pp. 93–101. Available at: <https://doi.org/10.14710/jmki.9.2.2021.93-101>.
- Hartono, B. and Jauhari, H. (2020) *FORMULASI, IMPLEMENTASI, EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK*. Cet 1. Purwokerto: CV. IRDH.
- Irawati, Pageno, I. and Sisrilnardi (2025) "Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Bahodopi," *JSIP: Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan*, 1(2), pp. 41–57.
- Iswahiyudi (2022) *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI PASAR INPRES MANONDA KOTA PALU*. Universitas Tadulako.
- Kambuam, W. (2024) "PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM BIROKRASI PUBLIK: STUDI KASUS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DI MERAUKE," *JIIIC: JURNAL INTELEK INSAN CENDIKIA*, 1(10), pp. 8221–8233.
- Mahayani, N.M.H. (2025) "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SOSIAL DI MASYARAKAT MARGINAL: STUDI LITERATUR TENTANG HAMBATAN DAN STRATEGI ADAPTASI," *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*, 11(2), pp. 181–188. Available at: <https://doi.org/10.56015/gjikplp.v11i2.352>.
- Makmur, S. (2023) "KESALAHAN PENAFSIRAN KOMUNIKASI, SUMBER DAYA,

- DISPOSISI DAN STRUKTUR BIROKRASI DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN," 1(3).
- Miles, M., Huberman, M. and Saldaña, J. (2014) *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook, Zeitschrift fur Personalforschung*.
- Mufidah, S., Mustainah and Nawawi, M. (2024) "Manajemen Pemungutan Retribusi Sampah di Kelurahan Taipa, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu," *JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 5(5), pp. 1111–1121.
- Mulasari, S.A. (2013) "HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN DAN SIKAP TERHADAP PERILAKU MASYARAKAT DALAM MENGOLAH SAMPAH DI DUSUN PADUKUHAN DESA SIDOKARTO KECAMATAN GODEAN KABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA," *Jurnal Kesehatan Masyarakat (Journal of Public Health)*, 6(3). Available at: <https://doi.org/10.12928/kesmas.v6i3.1055>.
- Mulgan, G. (2009) *The Art of Public Strategy: Mobilizing Power and Knowledge For The Common Good*. Oxford University PressOxford. Available at: <https://doi.org/10.1093/oso/9780199289646.001.0001>.
- Presiden Republik Indonesia (2014) *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH*. Available at: <https://peraturan.bpk.go.id/Download/28013/UU%20Nomor%2023%20Tahun%202014.pdf>.
- Rahman, K.R. *et al.* (2023) "Pengembangan Kapasitas Pemerintah Mukim Singkir Yan Kedah Malaysia Dalam Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan," *BERDAYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(02 (Oktober)), pp. 9–16. Available at: <https://doi.org/10.25299/berdaya.2023.14768>.
- Rifaldi, M., Mahfuzat and Rusdin, R. (2026) "PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN BAHODOPI KABUPATEN MOROWALI," *JSIP: Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan*, 2(1), pp. 58–77.
- Rosadi, Moh. (2023) *Strategi Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu Dalam Pengelolaan Sampah Kota Palu*. Universitas Tadulako.
- Rusdin, R.Bte. (2021) "KOMUNIKASI DALAM IMPLEMENTASI PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA PALU," *KINESIK*, 8(1), pp. 53–61. Available at: <https://doi.org/10.22487/ejk.v8i1.144>.
- Sangkop, P.R., Pati, A.B. and Egeten, M.M. (2023) "Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik (Studi di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Manado)," 12(3). Available at: <https://doi.org/10.35797/jp.v12i3.50241>.
- Silfana (2024) *STRATEGI PEMERINTAH MEWUJUDKAN ADIPURA MELALUI PENGELOLAAN SAMPAH DI TEMPAT PEMROSESAN AKHIR KAWATUNA KOTA PALU*. Universitas Tadulako.
- Sutmasa, Y.G. (2021) "Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik," *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 4(1), pp. 25–36. Available at: <https://doi.org/10.47532/jic.v4i1.242>.
- Widiasih, S., Julina, F. and Sekarsari, D. (2024) "Tantangan Dan Peluang Dalam

- Implementasi Kebijakan Lingkungan Di Pemerintahan Daerah," *Irpia: Jurnal Ilmiah Riset dan Pengembangan*, pp. 46–51. Available at: <https://doi.org/10.71040/irpia.v9i11.267>.
- Widiprana, R.B., Ludigdo, U. and Rosidi, R. (2017) "Implementasi Kebijakan Publik Pelaporan Pemerintah Berbasis Akrua (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang)," *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 3(2), pp. 122–133. Available at: <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2017.003.02.5>.
- Widjaja, H.A.W. (2017) *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Depok: Rajawali Pers.
- Wijayanti, A.N., Dhokhikah, Y. and Rohman, A. (2023) "Analisis partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan sampah di Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur," *Jurnal Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan (Journal of Environmental Sustainability Management)*, pp. 28–45. Available at: <https://doi.org/10.36813/jplb.7.1.28-45>.
- Wirawan, M.Y. (2025) "Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Sebagai Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Bandar Lampung," *Jurnal Hukum Positum*, 10(1), pp. 44–62. Available at: <https://doi.org/10.35706/positum.v10i1.12615>.